

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terletak di ujung timur Indonesia, Papua merupakan sebuah provinsi yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Papua dan Papua Barat. Kata Papua berasal dari Bahasa Melayu Lama sebagai halnya ‘papuwah’ yang berarti ‘rambut keriting’. Terkenal kaya akan sumber daya mineral logam seperti tembaga, emas, dan perak. Dari bawah laut sampai puncak gunung, alamnya menyimpan banyak keindahan dimana merupakan anugerah terbesar bagi tanah Papua. Papua memiliki ratusan suku serta memiliki budaya dan adat yang beraneka ragam. Di sisi lain, provinsi berjuluk “Bumi Cendrawasih” ini masih berkuat dengan tantangan memperbaiki kemiskinan serta kriminalisme.

Indonesia sejak sebelum maupun sesudah merdeka telah mengalami berbagai macam masalah yang dialami, baik masalah internasional maupun masalah non internasional. Meskipun masalah ini dapat diselesaikan dengan berbagai cara, namun ada saja pihak- pihak yang tidak mau untuk menyelesaikannya dengan cara damai. Jika konflik yang terjadi tidak kunjung selesai, hal ini bisa saja menimbulkan terpecahnya suatu peperangan yang lahir dari konflik yang ada khususnya konflik bersenjata.

Terjadinya konflik bersenjata dimulai dari adanya suatu pertentangan kepentingan dengan bangsa lain atau ketidaksesuaian ideologi antar kelompok di dalam bangsanya sendiri. Secara tidak langsung, hal ini dapat dikatakan sebagai suatu bentuk perjuangan nasional atau memperjuangkan kepentingan negara. Berdasarkan pada banyaknya konflik bersenjata yang telah maupun sedang terjadi di berbagai negara di dunia, dalam hukum Humaniter Internasional konflik ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional (konflik dalam negara).

Konflik Papua merupakan konflik vertikal dan berlangsung lebih dari 50 tahun. Penyebab utama konflik ini adalah keinginan untuk “Papua Merdeka” yang diperjuangkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tindakan kriminal yang dilakukan kelompok bersenjata antara lain melakukan penembakan terhadap aparat keamanan maupun masyarakat di beberapa daerah di Provinsi Papua seperti yang terjadi di Kota Timika. Tindakan kriminal tersebut berupa penyerangan terhadap Pos TNI dan Polri, penyerangan terhadap anggota yang sedang patroli maupun masyarakat, pengrusakan, pembakaran fasilitas pemerintah dan swasta, TNI/Polri maupun masyarakat, melakukan penganiayaan dan atau perampasan senjata api aparat TNI/Polri, pengibaran bendera Bintang Kejora serta penyelundupan dan atau perdagangan senjata api.

Perang non internasional atau yang lebih dikenal dengan sebutan perang saudara ialah sengketa bersenjata yang terjadi antara pemberontak yang berperang (belligerent) dengan instansi pertahanan pemerintahan negara yang sah dan terjadi di wilayah negara dari suatu negara yang sedang mengalami konflik tersebut seperti halnya yang terjadi pada saat ini di Papua yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Organisasi Papua Merdeka didirikan pada bulan desember 1961 yang bertujuan untuk menentang penguasaan Indonesia terhadap Irian Jaya (pada saat ini disebut Papua dan Papua Barat) serta mereka mengaku bahwa Papua merupakan suatu wilayah kedaulatan yang berdiri sendiri dan ingin membentuk suatu negara yang merdeka.

Menurut Muhammad Nugroho Sugiyanto, 2017 Akan tetapi OPM dalam tindak pidananya dapat di klasifikasikan sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang dikarenakan melakukan kejahatan secara bersama. Namun, OPM dapat disebut juga sebagai Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) karena ingin memisahkan diri dari Indonesia dan menciptakan pemerintahan baru.

Tercatat sepanjang tahun 2021 terdapat kenaikan sebanyak 73 aksi menonjol terkait kriminalisme di Papua

Tabel 1. 1

Jumlah Aksi Menonjol Kriminalisme di Papua dari tahun 2017-2021

| No | Tahun | Jumlah Aksi menonjol (Kriminalisme) |
|----|-------|-------------------------------------|
| 1. | 2017 | 28 |
| 2. | 2018 | 35 |
| 3. | 2019 | 72 |
| 4. | 2020 | 107 |
| 5. | 2021 | 118 |

Sumber: Satgassus Nemangkawi Mabes Polri 2021

Terbukti dari data yang dicatat oleh Satuan Tugas Khusus Nemangkawi yang digagas oleh Mabes Polri, dari tahun ke tahun sejak 2017 hingga 2021 terdapat kenaikan jumlah aksi menonjol terkait dengan kriminalitas yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang ada di Papua terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan instansi pemerintahan negara yang memiliki fungsi sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan masyarakat, pengayoman masyarakat serta pelayanan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, 2007 guru besar pengamat ilmu polisi menyebutkan bahwa anggota kepolisian adalah polisi sipil dalam perubahan sosial di Indonesia. Maksudnya ialah masyarakat masih menganggap profesi anggota kepolisian sebagai media penyelesaian masalah kejahatan. Hal ini dikarenakan berbagai faktor seperti atribut atau seragam yang digunakan dan segala sesuatu yang melekat pada diri anggota kepolisian akan menimbulkan persepsi masyarakat terhadap anggota polisi menjadi sangar dan garang.

Anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, tetapi anggota kepolisian itu sendiri juga diberi pembekalan berupa etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian.

Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku anggota kepolisian untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Banyaknya aktifitas yang dilakukan kepolisian terhadap masyarakat ini membuat citra kepolisian dari masyarakat semakin berkembang. Dalam hal ini, anggota kepolisian perlu melakukan berbagai cara agar masyarakat dapat mempercayai tugas kepolisian dalam memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat salah satunya ialah program Binmas Noken. Hal ini pula dapat menjadikan keberadaan anggota kepolisian dalam membantu, berperan aktif, menjalankan tugas serta menyosialisasikan semua kebijakan serta memberikan rasa aman yang berhubungan dengan masyarakat.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008, menjelaskan bahwa penerapan Binmas Noken sebagai falsafah dan strategi merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat melalui kemitraan dengan warga masyarakat untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam era demokrasi dan penegakan hak asasi manusia. Binmas Noken yang menekankan pada pentingnya peran dan keterlibatan masyarakat sebagai sasaran kepolisian untuk mendukung terciptanya polisi yang profesional dan bertanggung jawab dalam hal ini merupakan suatu bentuk dukungan yang strategi terhadap program reformasi Kepolisian di Indonesia.

Menurut Eko Rudi Sudarto, 2021 salah satu program kerjanya adalah Binmas Noken. Binmas Noken yaitu Satuan Tugas Polri yang namanya diambil dari salah satu warisan budaya bangsa atau masyarakat Papua. Dimana Noken berarti menjadi sebuah inspirasi, menampung keluhan, menampung inspirasi, menampung segala macam saran dan pendapat dari rakyat yang ditujukan kepada kepala suku. Tujuan daripada program Binmas Noken Polri ialah untuk lebih banyak mendengar permintaan, keinginan dan masyarakat Papua.

Konsep Binmas Noken adalah perpaduan kata dari konsep Binmas sebagai satuan pada fungsi operasional kepolisian dan konsep Noken. Noken, tas tradisional yang bagi orang Papua adalah simbol martabat dan peradaban serta kehidupan. Secara sederhana, Binmas Noken memaknai sebagai operasi kepolisian untuk mengangkat harkat dan martabat kehidupan masyarakat dan rakyat Papua. Tugas utama Binmas Noken Polri adalah menjalankan misi atau operasi kepolisian yang bersifat kemanusiaan atau *soft approach policing* di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Binmas Polri sebagai program Binmas Noken yang dapat menciptakan hubungan dan memberikan layanan terhadap masyarakat.

Binmas Polri yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat dan juga merupakan pengembangan Pemolisian Masyarakat (Polmas) di desa atau kelurahan. Binmas Polri sebagai perwakilan anggota kepolisian dilingkungan masyarakat memiliki tanggung jawab dalam membina masyarakat atau komunitas dengan cara memberikan penyuluhan dan pembimbingan dalam rangka menumbuhkan perubahan sikap, perilaku, dan terbentuknya kesadaran atau ketaatan hukum guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. Salah satu programnya adalah Si-Ipar. Program yang menyoar anak-anak berusia 6-12 tahun tersebut diprioritaskan bagi mereka yang putus atau tidak bersekolah di wilayah Mimika.

Dimana dalam prosesnya, personel Binmas Noken membagikan atau memisahkan anak-anak yang sudah dan belum bisa membaca serta menulis. Tidak hanya belajar mengajar, Polri melalui tim kesehatan klinik Polres Mimika juga memberikan pelayanan kesehatan gratis berupa pemeriksaan hingga pemberian vitamin kepada warga sekitar.

Gambar 1.1 Kegiatan Program Si-Ipar



Sumber : <https://jurnalpolri.com/>

Sekarang ini banyak sekali organisasi memahami perlunya memberi perhatian yang cukup untuk membangun suatu citra yang menguntungkan bagi suatu organisasi tidak hanya dengan melepaskan diri terhadap terbentuknya suatu kesan publik negatif. Dengan perkataan lain, citra organisasi adalah *fragile commodity* (komoditas yang rapuh/mudah pecah). Namun, kebanyakan organisasi juga meyakini bahwa citra organisasi yang positif adalah esensial, sukses yang berkelanjutan dan dalam jangka panjang. Akan menjadi kerugian besar bagi suatu organisasi yang tidak memperhatikan komunitas di sekitarnya karena akan menimbulkan antipati komunitas terhadap perusahaan tersebut dan bersikap masa bodoh yang pada akhirnya tercipta citra negatif organisasi. Komunitas sekitar organisasi memiliki pengaruh besar dan langsung pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Makin baik hubungan dengan komunitas tersebut maka akan semakin baik pula citra organisasi di mata komunitas.

Sebagai wujud pengabdian memberi yang terbaik kepada masyarakat dan sekaligus tanggung jawab, kepedulian serta kepekaan terhadap lingkungan sosial dan komunitas sekitar organisasi, Binmas Polri mempunyai beberapa program *Community Relations*. Binmas Polri memiliki tugas membangun, mengembangkan, merawat dan meningkatkan citra corporate Polri sebagai organisasi besar yang modern, kreatif, inovatif, kapabel dan bertanggungjawab melalui berbagai kegiatan komunikasi, sosial, budaya dan lingkungan. Kegiatan *Community Relations* oleh Binmas Polri diharapkan mampu

membentuk opini positif perusahaan di komunitas sekitar dimana perusahaan berada.

Dalam hal ini, dibutuhkan peran dari program Binmas Noken dalam hal pendekatan keamanan pada wilayah Papua, yakni dengan mengedepankan prinsip-prinsip *Publik Relations* yang mampu untuk menanggulangi permasalahan komunikasi yang terjadi di Papua. Sehingga terciptanya rasa aman dan damai yang nantinya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pendekatan keamanan melalui Binmas Polri di wilayah Papua. Maka penulis menetapkan judul penelitian “STRATEGI COMMUNITY RELATIONS POLRI DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK MELALUI PROGRAM PENDEKATAN KEAMANAN DI PAPUA”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka identifikasi masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *Community Relations* Polri dalam membangun kepercayaan publik melalui program pendekatan keamanan di Papua?
2. Mengapa Polri menggunakan *Community Relations* dalam membangun kepercayaan publik melalui program pendekatan keamanan di Papua?
3. Bagaimana cara mengoperasionalkan *Community Relations* terhadap Binmas Polri dalam membangun kepercayaan publik melalui program pendekatan keamanan di Papua?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan latar belakang diatas, penelitian ini difokuskan pada permasalahan strategi *Community Relations* oleh Binmas Polri dalam membangun kepercayaan publik melalui program pendekatan keamanan di Papua.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang telah disebutkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi *Community Relations* yang dilakukan oleh Binmas Polri dalam membangun kepercayaan publik melalui program pendekatan keamanan di Papua?
2. Bagaimana kondisi kepercayaan publik terhadap Polri di Papua?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebagai berikut:

1. Bentuk dan upaya *Community Relations* Binmas Polri dalam membangun kepercayaan publik melalui program pendekatan keamanan di Papua.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat jalannya program Binmas Noken.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk kepentingan teoritis dan praktis, yakni:

1. Secara Akademik

- a. Memberikan sumbangan penelitian pengembangan ilmu komunikasi
- b. Memberikan bahan sebagai dasar pemikiran bagi peneliti selanjutnya dengan masalah serupa.
- c. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi akademisi.
- d. Memberikan suatu masukan berupa pemikiran bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan serupa khususnya bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa informasi bagi para pihak yang berkepentingan seperti praktisi *Publik relations*, masyarakat mengenai pengelolaan konflik di Papua, dan juga mahasiswa fakultas ilmu sosial dan politik Muhammadiyah Jakarta khususnya pada bidang ilmu komunikasi.